

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Gorontalo
post

Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota
Gorontalo.....

HARIAN GORONTALO POST
Pertama dan Terbesar di Gorontalo
www.hergo.co.id
TERBIT 20 HALAMAN
JUMAT, 11 SEPTEMBER TAHUN 2020

BPK Segera 'Kuliti' Anggaran Covid-19

GORONTALO - GP - Krisis kesehatan berupa pandemi Covid-19 yang kini sedang berlangsung, memaksa dilakukannya revaluasi anggaran oleh pemerintah, dan memblokirkan penggunaan dari rakyat itu untuk penanganan Covid-19.

Kondisi itu membuat badan pemeriksa keuangan (BPK) segera melakukan pemeriksaan, terkait penggunaan anggaran, proses realisasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, Rahmadi, menetapkan pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, pada pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi Gorontalo. Pemeriksaan yang dilakukan secara nasional ini diharapkan mampu menjawab masalah lambatnya penyerapan anggaran covid. "Pekan depan kita lakukan entry meeting, pemeriksaan dilakukan secara serentak di semua perwakilan BPK di Negeri ini," saat pemberian materi di Media Workshop BPK di Aula BPK Perwakilan Gorontalo, Kamis (10/9). BPK akan membidik kerja pemerintah dalam menanganai Covid-19 dan anggaran yang dikucurkan untuk menangani wabah ini. Rahmadi menegaskan akhir tahun BPK bisa menyelesaikan pemeriksaan dilapangan dan melaporkan temuan-temuan dilapangan.

sempat, kata Rahmadi, membahas anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19, digunakan untuk keperluan diluar itu.

Dalam acara yang dihadiri para pimpinan media, seperti Harian Gorontalo Post, Harian Rakyat Gorontalo, LPP TVRI, dan LPP BSI itu, Rahmadi juga membahas tugas dan fungsi BPK di Gorontalo.

AKUTABILITAS UNTUK SEMUA - Kepala BPK Gorontalo, Rahmadi (tengah) bersama pimpinan media di Gorontalo, saat workshop media, di aula kantor BPK, Kamis (10/9).

BPK Segera 'Kuliti' Anggaran Covid-19

dari halaman 1

Sebagai lembaga negara yang sejajar dengan Presiden, DPR/MPR, MA, MK, BPK berkomitmen menjaga independensi, transparansi dan akuntabel dalam menjalankan tugas berdasarkan UU. BPK Gorontalo berdiri pada tahun 2007 dan menjalankan tugas perdana pada tahun 2008. Selama 12 tahun menjalankan pemeriksaan di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Gorontalo, BPK mengaku banyak menemukan masalah selama penilaian. Saat pemeriksaan, banyak temuan-temuan yang kerap terjadi berulang kali. Sebagai lembaga penilai, BPK mengaku tidak bisa memberikan sanksi dan menghukum lembaga berdasarkan hasil temua tersebut. Jika temuan dilapangan mengandung unsur pidana, maka temuan langsung dilaporkan kepada aparat hukum. Namun, jika temua hanya berupa pelanggaran administratif atau kerugian yang tidak disengaja, maka BPK memberikan rekomendasi kepada lembaga yang diperiksa.

"Kami banyak menemui masalah berupa kekurangan volume pembangunan infrastruktur, belanja kantor yang tidak sesuai dilapangan

dan pengelolaan pajak yang tidak sesuai," katanya.

Dari pemeriksaan itu, BPK mengklaim seluruh pemerintah di Gorontalo bergantung pada transfer anggaran dari pusat. Jika tidak ada biaya fisikal dari pusat, dipastikan pemeritnahan di Gorontalo tidak akan berjalan dengan baik. "Disini belum ada PAD yang bisa menunjang pemerintahan, sebagian besar anggaran bergantung dari pusat," ujar Sarjono Kepala Subauditorat BPK Gorontalo. Dari data yang dikumpulkan selama ini, BPK melihat hampir semua pemerintahan menggunakan anggaran untuk belanja operasional. Sementara anggaran untuk belanja moda yang menghasilkan aset bagi daerah sangat minim. "Banyak pengeluaran yang digunakan tidak menghasilkan aset, akibatnya pembangunan berkurang," katanya.

Dari data yang dilampirkan BPK, Pemerintah Boalemo menjadi urutan teratas dalam penggunaan anggaran untuk belanja modal dan menghasilkan PAD bagi daerah. Sementara itu, pemerintah Kota Gorontalo menjadi urutan pertama untuk belanja barang dan jasa diikuti pemerintah Provinsi Gorontalo. Padahal, jika belanjaga pegawai besar dalam

suatu daerah, maka pembangunan berkurang. Karena anggaran banguak digunakan untuk pengeluaran tanpa aset. "Ini menjadi tantangan, agar bisa meningkatkan pendapatan daerah dengan cara belanja modal," katanya. Peningkatan PAD bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan biaya dari pusat. Pengoptimalan potensi daerah berupa wisata, dinilai bisa meningkatkan penghasilan daerah. Namun, masalah pajak kerap menjadi persoalan yang hingga kini masih banyak ditemui dilapangan. Banyak retribusi pajak yang bisa menjadi PAD malah tidak dipungut meski sudah ada aturan. "kalaupun ada yang dipungut masih dibawah tarif, atau ada yang tidak didukung dengan perda dan ada yang tidak dipertanggungjawabkan didaerah," katanya. BPK menyarankan agar pemerintah mampu meningkatkan PAD, mengawasi pembangunan infrastruktur dan mendahuukan belanja modal serta menyelesaikan kerugian negara yang kerap ditemui akibat kelalaian. "tapi patut kita apresiasi, lima tahun terakhir semua sudah mendapat predika WTP, artinya ada perkembangan dalam hal pengelolaan keuangan negara," katanya. (tr-69)

Diambil dari Harian Gorontalo Post. Hari Jumat, tanggal 11 September 2020